

## PENANGANAN STUNTING DI PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PERSPEKTIF *SOUND GOVERNANCE*

Fajar Noor Ramadhian<sup>1(a)</sup>, Indah Adi Putri<sup>2(b)</sup>, Ria Ariany<sup>3(c)</sup>, Roni Ekha Putera<sup>4(d)</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

<sup>a)</sup>ramadhian\_f@yahoo.com, <sup>b)</sup>indahadiputri@soc.unand.ac.id, <sup>b)</sup>riaariany@soc.unand.ac.id,

<sup>d)</sup>roniekhaputera@soc.unand.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

19-06-2023

Diterbitkan Online:

30-09-2023

#### Kata Kunci:

Penanganan Stunting, Provinsi Sumatera Barat, Sound Governance

### ABSTRAK

Kesepakatan *Universal Health Coverage* (UHC) pada tahun 2014 yang dibangun oleh berbagai negara melalui *World Health Organization* (WHO). WHO mengumumkan bahwa 22,2 % balita di dunia mengalami stunting atau sekitar 150,8 juta balita. Kekurangan gizi merupakan aspek yang vital bagi kemajuan suatu bangsa. Hal ini menjadikan perhatian pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan stunting dibuktikan dengan kesepakatan akan kebijakan dalam menangani masalah stunting. Perhatian terhadap status gizi ini harus diiringi dengan penanganan stunting secara masif. Meskipun angka stunting SSGI menurun dari 24,4% pada tahun 2021 menjadi 21,6% pada tahun 2022, provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan angka stunting yang cukup tinggi. Salah satu kota di Sumatera Barat yang menjadi penghasil pangan hewani dan nabati terbesar adalah kota Padang Panjang. Potensi Kota Padang Panjang diharapkan mampu menunjang perkembangan generasi muda secara maksimal. Namun ironisnya, sekitar 19% remaja masih menderita gizi buruk dan stunting di Kota Padang Panjang pada tahun 2018. Selain itu, wilayah ketiga di Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan Bappenas sebagai tempat penitipan anak stunting, yakni Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan konsep/teori *sound governance* menurut Ali Farazmand. Penelitian ini menggunakan metode literature review. Penelitian ini menghasilkan analisis adanya kebijakan yang inklusif untuk mendukung aksesibilitas daerah kabupaten/kota berpengaruh terhadap potensi kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya, hal ini menjadi poros pembangunan kesehatan dan gizi. Terakhir, seharusnya adanya kebijakan yang menghasilkan sinergitas internasional dalam pemanfaatan sumber daya pertanian dan perikanan yang berpengaruh dalam pembangunan kesehatan dan gizi di daerah.

#### Keywords:

Stunting Handling, West Sumatera Province, Sound Governance

#### Corresponding Author:

ramadhian\_f@yahoo.com

#### ABSTRACT

This The *Universal Health Coverage* (UHC) Agreement in 2014 was established by various countries through the *World Health Organization* (WHO). WHO announced that 22.2% of children under five in the world experience stunting or around 150.8 million children under five. Malnutrition is an important aspect for the progress of a nation. This has attracted the Indonesian government's attention to overcoming the stunting problem as evidenced by the agreement on policies for dealing with the stunting problem. Attention to nutritional status must be done with massive handling of stunting. Even though the SSGI stunting rate decreased from 24.4% in 2021 to 21.6% in 2022, West Sumatra province is one of the provinces in Indonesia with a fairly high stunting rate. One of the cities in West Sumatra which is the largest producer of animal and vegetable food is the city of Padang Panjang. The potential of Padang Panjang City is expected to be able to support the development of the younger generation optimally. However, ironically, around 19% of teenagers still suffered from malnutrition and stunting in

*Padang Panjang City in 2018. Apart from that, the third area in West Sumatra Province that was designated by Bappenas as a place to care for stunted children, namely Solok Regency. This research uses the concept/theory of good governance according to Ali Farazmand. This research uses a literature review method. This research produces an analysis of the existence of inclusive policies to support the accessibility of district/city areas which have an impact on the potential for economic prosperity. Furthermore, this becomes the axis of health and nutrition development. Finally, there should be policies that produce international synergy in the use of agricultural and fisheries resources which have an influence on the development of health and nutrition in the region.*

**DOI:**

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i3.758>

**PENDAHULUAN**

Kesepakatan *Universal Health Coverage* (UHC) pada tahun 2014 yang dibangun oleh berbagai negara melalui *World Health Organization* (WHO). Upaya ini dilakukan untuk menjamin pemerataan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, kuratif, preventif, dan rehabilitatif yang kualitas dan biayanya dapat didukung oleh seluruh anggota masyarakat. Akses yang adil dan berkualitas terhadap layanan kesehatan serta perlindungan dari risiko keuangan bagi seluruh masyarakat pengguna layanan kesehatan kini diterapkan di Indonesia (Kemenkes RI, 2010).

Kesehatan merupakan yang utama bagi setiap warga negara diseluruh dunia. Kebutuhan terkait dengan kesehatan menjadi hal mendasar dan penting untuk di pertahankan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan terdapat 22,2 juta anak di seluruh dunia menderita kekurangan gizi dan stunting, termasuk sekitar 150,8 juta anak di bawah usia 5 tahun. Stunting adalah suatu kondisi dimana anak tidak mampu tumbuh dan berkembang akibat infeksi berulang dan gizi buruk pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), berdasarkan panjang badan relatif terhadap umur, tinggi badan relatif terhadap umur dengan cutoff z-score. dari 2 standar deviasi (SD). Indonesia menduduki peringkat kedua dengan jumlah kasus stunting tertinggi di Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia menduduki peringkat kelima dengan jumlah kasus stunting tertinggi di dunia. (Ipan et al., 2021). Hal ini menjadi mengkhawatirkan dikarenakan berpengaruh terhadap masa depan bangsa Indonesia. Permasalahan ini tidak dapat dipinggirkan akan fatalnya dampak yang akan timbul. Resiko yang akan ditimbulkan berupa morbiditas (angka kesakitan) dan mortalitas (angka kematian).

Keberhasilan pembangunan nasional suatu negara ditentukan oleh tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Memiliki kekuatan jasmani dan rohani, tenaga dan keunggulan di samping penguasaan ilmu pengetahuan. Jadi, gizi buruk merupakan aspek penting bagi kemajuan suatu negara. Kesehatan mental, kemampuan intelektual dan kognitif akan berdampak dalam jangka menengah. Sementara itu, dampak jangka panjangnya adalah munculnya kualitas sumber daya manusia yang buruk dan munculnya permasalahan penyakit degeneratif di usia dewasa.

Hal ini menjadikan perhatian pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan stunting dibuktikan dengan kesepakatan akan kebijakan dalam menangani masalah stunting seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2013 tentang Gerakan nasional Percepatan Perbaikan Gizi dan aturan lain dibawahnya. Karena dalam skala nasional, hal ini menjadi bukti dan pedoman bagi daerah untuk mengatasi permasalahan stunting dengan cara mengatasinya secara desentralisasi. Permasalahan gizi dan stunting di Indonesia memiliki dampak yang serius. Ini adalah salah satu permasalahan yang menjadi perhatian khusus saat ini. Keterlambatan tumbuh kembang pada balita dapat mengakibatkan berkurangnya produktivitas dan kualitas sumber daya manusia di kemudian hari. Selain itu, hal ini menjadi persoalan kesehatan nasional yang memiliki dinamika permasalahan dalam upaya mengatasi pembangunan kesehatan nasional. Terlebih kebijakan merupakan suatu tiang dalam pelaksanaan program pemerintah yang dapat menghambat kenaikan stunting. Perlunya sebuah kebijakan yang partisipatif dengan bersama-sama

melaksanakan, menyusun dan pengawasan kebijakan oleh setiap pemangku kepentingan di daerah.

Permasalahan stunting telah menjadi prioritas pembangunan nasional melalui Rencana Aksi Nasional Gizi dan Ketahanan Pangan tahun 2018 (Megawati & Wiramihardja, 2019). Permasalahan ini dijadikan prioritas agar setiap pembangunan kesehatan lokal, dapat masuk untuk penyeimbangan kepentingan yang terdapat di nasional. Sehingga dibutuhkan pengelolaan tata kelola pemerintah yang maksimal terutama pada pemerintahan daerah. Diperlukan adanya terobosan yang koheren antara beberapa konseptualisasi dan praktek untuk dapat menciptakan tata kelola yang lebih baik. Pemerintahan yang bagus merupakan sebuah konsep yang dipakai oleh berbagai negara demokrasi dalam menata dan mengelola pemerintahan saat ini. Selama satu dekade membuat konsep ini semakin berkembang hingga menciptakan sebuah konsep turunannya yakni *sound governance*. Menurut Farazmand, tata kelola yang baik memiliki beberapa komponen kunci sebagai suatu sistem yang dinamis, yaitu proses, struktur, aturan, nilai pengetahuan, organisasi, manajemen, sektor swasta, politik, globalisasi, transparansi dan akuntabilitas (Farazmand, 2004). Menjadikan kebijakan lebih persoalan proses pembuatan dan implementasi, kebijakan dibidang kesehatan masyarakat merupakan persoalan politik yang dapat dianalisis arah pembangunan kesehatan di tingkat lokal.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesehatan dalam praktiknya tidak selalu menjadi alat implementasi kebijakan. Kebijakan penanganan stunting dapat dianalisis dalam proses pengembangan kebijakan dari perspektif permasalahan sosial budaya, potensi lokal dan mengembangkan alternatif kebijakan untuk mencegah dan mengatasi gizi buruk dan stunting (Media & Elfemi, 2021). Adanya ketentuan konstitusi di Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI), Pasal 28 ayat 2, memberikan dasar perlunya ketentuan subordinasi hukum terkait masalah Kesehatan sebagai wujud tanggung jawab Negara. dalam menghormati hak asasi anak. Dengan mengambil tindakan komprehensif di berbagai bidang pengelolaan dan pencegahan stunting (Haryanti & Nurhayati, 2019). Angka kejadian stunting pada anak di bawah 5 tahun (balita) di

Indonesia pada tahun 2015 sebesar 36,4%. Artinya, lebih dari sepertiga atau 8,8 juta anak kecil mengalami masalah gizi sehingga menyebabkan tinggi badan mereka berada di bawah standar usianya (Rahmadhita, 2020).

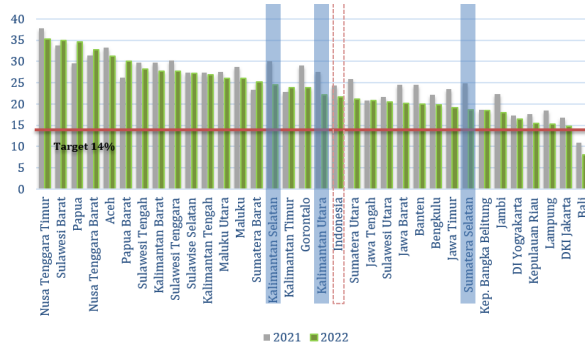
Dalam penelitian Rahmadhita dengan judul “Permasalahan Stunting dan Pencegahannya” Upaya Pemerintah tersebut telah menghasilkan implementasi program penurunan emisi pada tahun 2016 sebesar 27,5%. Namun angka stunting kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 29,6%. Penelitian lain menunjukkan perlunya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta perannya dalam pencegahan dan deteksi dini stunting pada balita (Hamzah & B, 2020; Laili & Andriani, 2023). Selain itu, pemerintah membentuk organisasi partisipatif agar menyelenggarakan program pemberdayaan kader dalam upaya pencegahan stunting, diharapkan kader ini dapat meningkatkan pengetahuan dan motivasi kesehatan masyarakat (Mediani et al., 2020). Berbagai metode dan media telah digunakan dan terbukti paling efektif, yaitu metode presentasi dan diskusi melalui media audio visual (Vinci et al., 2022).

Kajian lainnya fokus pada Antenatal Care (ANC), yaitu pelayanan kebidanan pada ibu hamil yang merupakan program dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Pusat. digunakan sebagai masukan untuk menentukan rencana penanggulangan stunting. (Yasril & Sari, 2022). Penelitian kuantitatif yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Air Bangis menunjukkan bahwa 57,5% anak stunting adalah laki-laki, mayoritas adalah ibu dari anak kecil, dan anak stunting mempunyai pendidikan menengah yaitu 48,5% dan bekerja sebagai ibu rumah tangga (ibu rumah tangga). . hingga 95,5 pada anak-anak dari 3 hingga 5 hingga 67% (Anggraini & Rusdy, 2019). Dengan demikian, pola asuh orang tua yang paling besar pengaruhnya terhadap gizi buruk dan stunting adalah ibu. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan suami berperan penting dalam memberikan pengasuhan alternatif jika ibu tidak mampu mengasuh anak (Masrul, 2019).

Pembangunan sebagai salah satu proses perubahan yang dinamis dalam mengubah negara menjadi maju. Tumbuh elemen sosial ekonomi suatu negara tidak akan tercapai jika tidak diiringi dengan kerjasama dan partisipasi

masyarakat sipil. Oleh karena itu pentingnya birokrasi publik menghubungkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam program pembangunan negara (Weidner, 1970). Serta pentingnya inovasi sistem administratif dalam memastikan program pembangunan memenuhi tujuan dalam waktu dan sumberdaya minimum (Katz, 2007). Penelitian Firdaus (2016) melihat mengapa dan bagaimana pembentukan *sound governance* sebagai konsep alternatif untuk meningkatkan kapasitas pemerintah untuk berinovasi dalam kebijakan dan administrasi dalam rangka mewujudkan interkoneksi pembangunan lintas kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya wilayah Kota Mamminasata. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan jenis studi kasus ini menghasilkan adanya korelasi antara *sound governance* yang telah dipraktikkan dengan pembangunan di kawasan Metropolitan Mamminasata. Selain itu, Holidin menjelaskan pentingnya inovasi kebijakan *sound governance* dalam menciptakan kebaruaran pendekatan dan bentuk praktis dalam governance. Oleh karena itu, pentingnya studi ini mendapatkan perhatian pemerintah daerah dalam kebijakan penanganan stunting di Provinsi Sumatera Barat.

**Gambar 1. Diagram Angka Stunting SSGI 2021 dan 2022 setiap Provinsi**

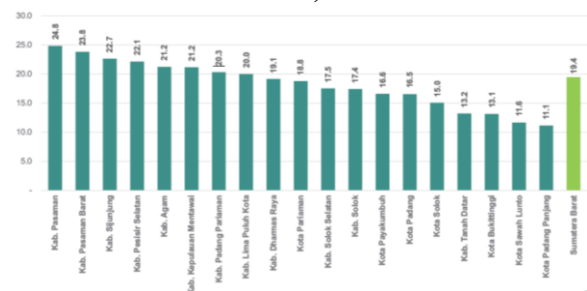


Sumber: Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Perhatian terhadap status gizi ini harus diiringi dengan penanganan stunting secara masif. Sebagai suatu desakan Internasional untuk berkomitmen dalam penanganan masalah stunting. Ditinjau dari data diatas, terdapat 3 (tiga) provinsi yang memiliki penurunan stunting di tahun 2021-2022 yang cukup signifikan yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara dan Sumatera Selatan.

Namun terdapat 5 (lima) provinsi yang mengalami peningkatan angka stunting pada tahun 2021-2022, yaitu Sulawesi Barat, Papua, NTB, Papua Barat, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur. Meskipun angka stunting SSGI terlihat mengalami penurunan dari 24,4% pada tahun 2021 menjadi 21,6% pada tahun 2022, namun provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki angka stunting pada anak dan remaja yang cukup tinggi, yaitu setara dengan 19,4% dari total jumlah anak. menderita stunting. anak-anak dan remaja. remaja pendek dan 7,2% remaja sangat pendek, 1,9% remaja sangat kurus dan 7,6% remaja sangat kurus. (Pasalina et al., 2022).

**Gambar 2. Diagram Prevalensi Balita Underweight (Berat Badan Menurut Umur) Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat, SSGI 2022**



Sumber: Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Salah satu kota di Sumatera Barat yang menjadi penghasil pangan hewani dan nabati terbesar adalah kota Padang Panjang. Potensi Kota Padang Panjang diharapkan mampu menunjang perkembangan generasi muda secara maksimal. Namun ironisnya, pada tahun 2018, masih terdapat sekitar 19% remaja yang mengalami gizi buruk dan stunting di Kota Padang Panjang. Selain itu, wilayah ketiga di Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan Bappenas sebagai daerah stunting, yakni Kabupaten Solok. Namun Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumbar di Solok masih belum optimal, terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang belum terpapar 1.000 HPK, dan kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan program sosialisasi 1.000 HPK. Serta belum dialokasikannya anggaran untuk melaksanakan kegiatan program penurunan stunting (Annisa, 2021).

Setelah merefleksikan banyak karya literatur penelitian sebelum ini, topik yang membahas tentang Penanganan Stunting di Provinsi Sumatera Barat dalam Perspektif *Sound Governance* masih jarang ditemukan. Oleh karena itu, artikel yang saat ini dimaksudkan turut mengisi sela-sela tersebut dengan mencari tahu bagaimana tatakelola pemerintahan yang diterapkan dalam penanganan stunting dapat berkontribusi terhadap peningkatan inovasi kebijakan penanganan stunting. Dalam hal ini, konteks kajian *sound governance* dalam penerapan penanganan stunting berperan sebagai pusat implementasi kebijakan. selanjutnya, artikel saat ini diharapkan dapat menjadi referensi terhadap kajian yang akan berlanjut terkait penanganan stunting, dan *sound governance* bagi pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan literature review. Literature review merupakan antara lain metode bentuk prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi data ke bentuk tertulis maupun lisan dari bacaan, kepustakaan, dan pengolahan penelitian (Fink, 2014). Data atau informasi tersebut ditangkap dari majalah, buku, artikel ilmiah, dan literatur lainnya yang memuat masalah penelitian. Kata kunci yang dipakai terkait konsep *sound governance* dan penanganan stunting di Provinsi Sumatera Barat mudah ditemukan pada internet. Identifikasi dan perbandingan dua aturan dibutuhkan metode yang tepat dalam perhitungan sumber yang digunakan. Pertimbangan aspek-aspek tersebut, penelitian ini menggunakan metode literature review sistematis. Fink mengartikan tinjauan literature sistematis sebagai tinjauan literature dengan sistematis dalam mendefinisikan topik masalah yang jelas dan komprehensif untuk mengidentifikasi kesenjangan dan menggambarkan penelitian di masa lalu dalam topik, objek penelitian, hasil penelitian dan metode. Metode tersebut menghasilkan inventarisasi penelitian dimasa mendatang sebagai topik potensial.

Kata kunci yang dikenakan dalam pencarian tinjauan pustaka yakni tata kelola pemerintahan, Provinsi Sumatera Barat, Penanganan Stunting, dan *sound governance*, serta istilah yang dapat mewakili politik komparatif, desentralisasi, dan beragam konsep lainnya. *Google search* dan *Google Scholar* digunakan untuk meningkatkan peluang

bertemu karya ilmiah. *Google search* masih komprehensif untuk digunakan dalam meningkatkan ketersediaan sumber terpercaya seperti instansi maupun badan pemerintah terkait dengan politik dan pemerintahan.

Peneliti menemukan 5.323 jurnal yang sesuai dengan kata kunci tersebut. Jurnal penelitian tersebut melalui proses diskriminasi, sehingga dieksklusi karena terbitan dibawah tahun 2016 dan tidak menggunakan bahasa inggris. Assesment kelayakan 892 jurnal, masih terdapat jurnal yang dipublikasi dan jurnal yang tidak sesuai dengan kriteria inklusi dilakukan eksklusi dengan 32 jurnal tidak terkait topik, 12 jurnal menggunakan ruang lingkup kecil, 10 jurnal daerah kecamatan, 120 jurnal bukan studi desain, sehingga 20 jurnal yang dilakkan review.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam memahami kebijakan publik, penting dalam melihat beragam faktor yang mendahulukan suatu implementasi kebijakan dalam tata kelola pemerintahan sehingga menjadi Penanganan Stunting di Provinsi Sumatera Barat dalam Perspektif *Sound Governance*. Dalam upaya pengaturan tata kelola pemerintahan, tidak cukup hanya memiliki satu aktor saja, baik pemerintah maupun swasta, namun diperlukan pengetahuan interaktif dan kapasitas sumber daya untuk mengatasi permasalahan tersebut (Kooiman, 1993). Tentunya dalam hal tata kelola pemerintah, Ali Farazmand (2004) memperkenalkan *Sound Governance* sebagai gagasan transformasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan setelah menjawab tantangan pemerintahan di era globalisasi. Penerapan tata kelola yang baik merupakan salah satu bentuk upaya untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik atau biasa dikenal dengan istilah *good governance*.

Tata kelola yang baik memiliki beberapa komponen dan aspek utama. Sebagai elemen dinamis dari suatu sistem dinamis, elemen dan komponen tersebut berinteraksi secara dinamis satu sama lain. Dengan demikian, membentuk satu kesatuan dengan bekerja dengan keberagaman, kompleksitas dan intensitas internal serta tantangan, hambatan dan peluang eksternal. Fungsi internal dan eksternal yang dinamis terus berinteraksi untuk menjaga sistem tata kelola dinamis yang fokus pada arah dan tindakan. Menurut Farazman, aspek-aspek tata

kelola pemerintahan yang baik adalah: 1. Proses, 2. Struktur, 3. Persepsi dan Nilai, 4. Konstitusi, 5. Organisasi dan Lembaga, 6. Manajemen dan kinerja, 7. Politik, 8. Sektor, 9. Kekuatan internasional, 10. Etika, akuntabilitas dan transparansi.

Dengan demikian, aspek dasar tata kelola pemerintahan yang baik dapat diklasifikasikan menjadi empat elemen dan lima komponen utama. Keempat elemen tersebut bertujuan untuk membangun hubungan politik yang komprehensif antara negara, masyarakat sipil, dunia usaha, dan kekuatan internasional. Kekuatan internasional ini dapat mencakup perusahaan, organisasi global, dan perjanjian internasional. Lalu ada 5 (lima) komponen penting yaitu reformasi struktural, proses, nilai, kebijakan dan manajemen. Kesadaran akan metabolisme kelima komponen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Selama ini munculnya eksklusivitas terjadi pada masing-masing organisasi/departemen dalam penerapan masing-masing lima komponen tersebut.

### **Inklusifitas Pemerintah pada Kebijakan Penanganan Stunting di Provinsi Sumatera Barat**

Pada masa *Sustainable Development Goals* terjadi saat ini menjadi salah satu penyebab peningkatan dan perkembangan produktifitas kebijakan terkait kesehatan. Mulai dari pemberantasan kemiskinan, mengapus kelaparan (*zero hunger*) dan kurang gizi, pemberantasan penyakit, perbaikan kesehatan ibu dan anak, peningkatan pendidikan, perbaikan lingkungan dan sanitasi, keamanan gizi dan pangan, kesetaraan gender dan kerja sama antar bangsa. Peningkatan dan perkembangan hal ini seharusnya menjadi sebuah upaya dan peluang dalam memperkuat serta memajukan Sumber Daya Manusia sebagai negara dengan yang memiliki 30 indikator Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (Indrawati & Tjandrarini, 2018).

Kondisi kesehatan dapat menjadi aspek penting dalam keamanan dan kesejahteraan suatu negara. Berkat kesehatan, pembangunan manusia akan mampu membangun dan memajukan negara, namun juga harus memperhatikan perlindungan kesehatan manusia secara besar-besaran. Saat ini peran teknologi terhadap manusia belum mampu mendorong aspek kebijakan kesehatan masyarakat, sedangkan aspek gizi dan kesehatan sulit dihubungkan karena dipisahkan

oleh kapasitas masyarakat. Untuk itu, untuk mencapai hal tersebut, pemerintah menerbitkan Perpres 72 Tahun 2021 tentang Pendorongan Penurunan Stunting sebagai poros penguatan dan pengembangan kebijakan terhadap permasalahan gizi buruk stunting di Indonesia. Hal ini sangat relevan terutama dalam konteks dinamika strategi kesehatan, dimana kebijakan tentunya akan lebih fokus pada peningkatan gizi masyarakat.

Namun, dengan kondisi yang lazim digunakan untuk pembangunan infrastruktur saat ini, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kebijakan tersebut dapat dikembangkan secara komprehensif atau tidak. Secara umum istilah pembangunan inklusif sering dipahami sebagai perlawanan terhadap pembangunan eksklusif, yaitu pembangunan yang mempengaruhi kepentingan kelompok eksklusif tertentu. Kesadaran akan pentingnya pembangunan inklusif bersumber dari realita pembangunan nasional yang mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi (*growth*) yang tajam, namun tanpa pengaruh signifikan dan tidak dijalani oleh kelompok menengah ke bawah. (pedesaan) atau daerah kumuh, di pinggiran kota. Meskipun pertumbuhan ekonomi pesat, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih tetap atau bahkan stagnan, terutama di daerah-daerah di luar pemerintahan pusat.

Pembangunan inklusif adalah suatu pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk menarik kelompok dan wilayah tertentu yang mempunyai sedikit akses terhadap proses pembangunan atau berada di luar monopoli sosial partisipasi dalam proses pembangunan atau yang disebut dengan integrasi sosial.

Dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 didasarkan pada 5 (lima) pilar utama untuk mempercepat proses penurunan angka stunting, pertama penguatan komitmen dan visi pimpinan kementerian, lembaga, provinsi, daerah, pemerintah kabupaten atau kota dan desa. Kedua, memperkuat komunikasi tentang perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, memperkuat konvergensi intervensi yang spesifik dan sensitif di dalam kementerian atau organisasi, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan pemerintah tingkat masyarakat. Keempat, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Kelima, melakukan konsolidasi

dan pengembangan sistem data, informasi, riset, dan inovasi.

Pentingnya hal ini tercermin jelas dalam upaya pembangunan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan kondisi tersebut dijelaskan bahwa pembangunan kesehatan hanya berpedoman pada pelibatan kelompok tertentu, oleh karena itu daerah terpencil dan terpencil harus dimasukkan dan diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan tersendiri untuk menciptakan integrasi.

Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan ditunjukkan dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Keterlibatan pemangku kepentingan agar dapat berperan aktif dan kolaboratif dalam upaya membangun konsensus semakin memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu.

Lebih jauh lagi, kebijakan-kebijakan tersebut harus dilaksanakan secara positif untuk mengatasi kesenjangan, kemiskinan dan keterbelakangan yang menjadi permasalahan dalam kehidupan setiap daerah. Hal yang mesti diperhatikan yakni, pertama, dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, kedua, kesadaran dalam menjaga pembangunan dibidang kesehatan, ketiga, adanya orientasi pada lingkungan yang memiliki keberlanjutan.

### **Mempersiapkan masyarakat sipil untuk mencapai visi sebagai poros pembangunan kesehatan global**

Sektor kesehatan dan gizi dalam pembangunan nasional memegang peranan penting, dengan prioritas diberikan untuk mendorong pertumbuhan daerah terutama melalui pertanian-industri dan industri, meningkatkan ekspor produk pertanian, makanan laut dan hasil perairan, meningkatkan peluang dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial. manfaat. -sifat petani dan petani maritim, sekaligus mendukung pembangunan nasional melalui pajak yang diperuntukkan bagi berbagai transaksi.

Potensi dan tantangan Indonesia dalam menghadapi orientasi kembali kebijakan pembangembangunan kesehatan dan gizi harus dikembangkan. Oleh karenanya paradigma dalam pembangunan sektor kesehatan dan gizi harus dimulai untuk membuka prioritas pembangunan terhadap ekonomi masyarakat. Orientasi kebijakan pembangunan terhadap

perekonomian ini di wilayah provinsi seharusnya terintegrasi dengan pembangunan kesehatan dan gizi. Lebih lanjut, pembangunan kesehatan dan gizi menghasilkan peningkatan efisiensi dan efektivitas terhadap aktifitas ekonomi yang berkembang di berbagai daerah. Hal ini menjadi efek domino berkelanjutan berupaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah terpencil.

Perubahan ini mesti dilakukan dalam konteks pembangunan dengan cara sinergitas berbagai aktifitas masyarakat yang ada di daerah menjadi suatu kesatuan terintegritas pada wilayah nasional. Potensi ketahanan pangan dan gizi yang berlebih di berbagai wilayah yang selama ini menunjang pembangunan dan pemenuhan kesehatan dan gizi masyarakat menjadi landasan penguatan struktur perekonomian, yang di atasnya dapat dibangun industri yang semakin modern dan berkembang. Kemajuan tersebut juga mencakup upaya di bidang energi, minyak dan gas, pariwisata dan jasa, yang kemudian diintegrasikan ke dalam transportasi dan pengembangan sumber daya di wilayah provinsi Sumatera Barat. Kesejahteraan masyarakat harus menjadi jantung pembangunan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan kesejahteraan daerah.

### **Bisnis pada Sektor Pertanian dan Perikanan di Provinsi Sumatera Barat**

Menurut Malau (2021) sektor pertanian dan perikanan merupakan unggulan utama yang seharusnya memiliki keberhasilan oleh Indonesia, Provinsi Sumatera Barat merupakan wilayah sentral dalam produksi pangan Indonesia seperti padi, ubi kayu, jagung, kacang, dan jagung. Seharusnya dapat dijadikan penyelamatan dari berbagai permasalahan di Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Barat. Keunggulan pertanian dan perikanan membuat wilayah Provinsi Sumatera Barat menjadi tantangan dalam menghadapi beragam permasalahan pendapatan daerah, kinerja ekspor, peningkatan kesejahteraan, kemiskinan, lapangan pekerjaan, serta masih tingginya angka stunting di berbagai daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam hal ini penjelasannya adalah potensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sumatera Barat meningkat antara tahun 2017 hingga tahun 2019. Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera



Barat terus meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 5,17%. Terdapat 21 industri yang berkembang di wilayah provinsi Sumatera Barat. Analisis industri unggulan ditentukan dari pendapatan industri dengan adanya peningkatan kegiatan industri di daerah, sehingga meningkatkan pendapatan daerah yang bersangkutan, sehingga meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa pada sektor-sektor daerah, yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan volume sektor-sektor non unggulan. . kegiatan (Ramadhan et al., 2023).

Salah satu contoh usaha perikanan, jika melihat dan mengingat usaha perikanan yang hampir disemua pesisir dan pulau di Provinsi Sumatera Barat pada ekonomi dan kesejahteraan berkembang di wilayah kota yang mulai menyebar di setiap wilayah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, masalah disparitas antar wilayah pembangunan masih terlihat ketimpangan. Di kabupaten dan daerah pinggiran juga menyumbang komoditas pertanian yang berpengaruh terhadap keseimbangan ketahanan pangan dan gizi suatu daerah menjadi akan lebih seimbang, berdaya saing dan produktif.

Sehingga fakta dari kondisi tersebut, sektor agronomi dan perikanan berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang balita dan anak usia dini sehingga menghindari terjadinya stunting di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Faktanya SDM, kondisi sosial-ekonomi, hasil komoditi, dan aksesibilitas justru dapat memperkecil kemungkinan perkembangan stunting di Provinsi Sumatera Barat. Sehingga dibutuhkan kebijakan yang memiliki sinergitas terhadap beragam elemen ini dalam menunjang ketahanan pangan dan gizi masyarakat dalam upaya pencegahan stunting.

### **Pengaruh Kekuatan Internasional pada Kebijakan Perkembangan Kesehatan dan Gizi di Provinsi Sumatera Barat**

Kebijakan dalam usaha peningkatan kesejahteraan pada wilayah Indo-Pasifik, menjadikan banyak negara saling berpacu untuk pemasaran produk eksportir. Persaingan ini membentuk perdagangan ditingkat internasional semakin tidak terbatas, namun berpengaruh terhadap investasi di beberapa pasar di kawasan Indo-Pasifik untuk membangun jaringan distribusi. Untuk industri dan investasi dalam pengembangan sarana fisik dan prasarana perekonomian.

Persaingan pada beberapa negara di pasar regional untuk berinvestasi turut mengambil andil untuk mendapatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Agar kawasan Indo-Pasifik dapat berkembang dan menarik perhatian investor asing. Indo-Pasifik mencakup negara-negara besar (kekuatan besar) seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Amerika Serikat serta beberapa kekuatan menengah seperti Korea Selatan, Taiwan, Australia, dan negara-negara makmur lainnya di Timur Tengah. Kehadiran banyak negara maju tidak hanya menjadikan Indo-Pasifik sebagai jalur lalu lintas maritim tersibuk di dunia, namun juga menjadi tempat terjadinya konflik kepentingan dalam hal penguasaan lahan. Oleh karena itu, hal ini juga menjamin kepentingan nasional dalam hal pertumbuhan dan tingkat aktivitas perekonomian di wilayah tersebut.

Kondisi diatas jika dilihat masih sangat abstrak. Terlebih sampai saat ini, pemerintah tidak secara berkelanjutan dalam membangun visi dan misi tersebut. Hal ini menimbulkan penafsiran yang mengambang. Dari sejumlah analisis akademik terlihat beberapa kelompok yang memiliki pendapat adanya pengaruh aktifitas internasional terhadap kemajuan kesehatan masyarakat. Perbedaan pendapat ini diakibatkan terutama pengaruh yang diberikan tidak secara langsung dinikmati dan menjadi poros pembangunan kesehatan dan gizi di daerah. Kelompok pertama memahami sumbu magnet sebagai pusat atau poros operasional bisnis. Namun kelompok kedua memaknai poros ini sebagai pusat politik. Di daerah, hal ini dapat mendukung pembangunan strategis dan kepentingan daerah untuk menjadi pemain internasional utama di bidang agribisnis dan industri pangan. Sedangkan terdapat kelompok terakhir memaknai poros perdagangan internasional sebagai jalur perdagangan yang sebagian pengusaha dan pengendali jalur perdagangan.

Kondisi Geografis dan Letak Provinsi Sumatera Barat merupakan kawasan strategis. Kondisi ini didukung oleh jalur kereta api, bandara, dan pelabuhan kapal yang menghubungkan dua samudra, dan empat benua, dua peradaban, beragam agama dan ras, dan didukung kekuatan perdangan yang besar sebagai jalur lintas pelayaran yang sibuk. Kondisi geografis ini menjadi modal dasar yang penting untuk dimanfaatkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung



sinergitas elemen internasional terhadap perkembangan kesehatan di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

## PENUTUP

Dalam usaha mencapai pencegahan dan penanganan stunting secara holistik yang masuk dalam usaha pembangunan nasional dan global, penting adanya kebijakan yang mendukung untuk mengembangkan potensi daerah yang ada secara inklusif yakni pertama, penetapan kebijakan secara inklusif terhadap sektor pertanian dan kelautan sebagai basis pembangunan kesejahteraan masyarakat dengan adanya aksesibilitas masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menguasai sumberdaya. Kedua, menjadikan sektor pertanian dan perikanan sebagai sumber pendapatan ekonomi masyarakat. Ketiga, menjadikan dunia internasional target dalam mengembangkan jalur perdagangan internasional dengan Provinsi Sumatera Barat.

Dalam mencapai *good governance*, pemerintah dapat mengidentifikasi pemangku kepentingan yang dapat mengembangkan hubungan stakeholder terkait, selanjutnya mengarahkan dan mempengaruhi hubungan dalam memperoleh hasil, ketiga adanya koordinasi yang efektif antar setiap mekanisme. *Good governance* juga merubah pandangan pemerintah untuk mampu merubah dan melihat sistem stunting dimasa lalu dan mempercayai adanya kegagalan. Meskipun terdapat inovasi politik yang memungkinkan penyelesaian perselisihan dan ketegangan dalam masyarakat dengan partisipasi organisasi dan masyarakat sipil antara berbagai sektor publik dan swasta.

Sehingga penulis mengharapkan adanya penelitian selanjutnya yang meneliti permasalahan dalam siklus kebijakan stunting. Meskipun stunting erat kaitannya dengan medis, sistem pemerintah merupakan inti dari implementasi dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dari segi sosial, ekonomi, politik dan budaya memiliki hak dalam penelitian untuk mencapai sinergitas suatu sistem yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, Y., & Rusdy, H. N. (2019). Faktor Yang Berhubungan Dengan Stunting Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat.

*Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*, 10(2), 902–910. <https://doi.org/10.33859/dksm.v10i2.472>

Annisa, K. (2021). Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Solok. *Universitas Negeri Padang*.

Farazmand, A. (2004). *Sound governance: policy and administrative innovations*. In *Praeger Publishers*. Praeger Publisher.

Fink, A. (2014). *Conducting Research Literature Reviews: From the Internet to Paper*. In U. of C. at L. Angeles (Ed.), *Evaluation Journal of Australasia* (Fourth, Vol. 7, Issue 1). SAGE Publications Sage UK: London, England. <https://doi.org/10.1177/1035719x0700700117>

Firdaus, F. (2016). Sound Governance in the Development of Mamminasata Metropolitan Areas in South Sulawesi Province. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 20(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkap.9915>

Hamzah, S. R., & B, H. (2020). Gerakan Pencegahan Stunting Melalui Edukasi pada Masyarakat di Desa Muntoi Kabupaten Bolaang Mongondow. *JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia)*, 1(4), 229–235. <https://doi.org/10.36596/jpkmi.v1i4.95>

Haryanti, T., & Nurhayati. (2019). Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia bagi Anak Penderita Stunting. *Jurnal HAM*, 10(2), 249. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.249-260>

Indrawati, L., & Tjandrarini, D. H. (2018). Peran Indikator Pelayanan Kesehatan untuk Meningkatkan Nilai Sub Indeks Kesehatan Reproduksi dalam Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM). *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 28(2), 95–102. <https://doi.org/10.22435/mpk.v28i2.180>

- Ipan, Purnamasari, H., & Priyanti, E. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting. *Kinerja*, 18(3), 383–391.
- Katz, A. (2007). Pharmaceutical lemons: innovation and regulation in the drug industry. *Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev.*, 14, 1.
- Kemendes RI. (2010). Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014. In *Kemendes RI. Kementerian Kesehatan RI*.
- Kooiman, J. (1993). *Modern governance: new government-society interactions*. Sage.
- Laili, I., & Andriani, R. A. D. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Stunting. *JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia)*, 4(1), 85–94. <https://doi.org/10.36596/jpkmi.v4i1.552>
- Malau, N. A. (2021). Sektor Unggulan Ekonomi Indonesia. *Bonus Demografi Sebagai Peluang Indonesia Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi*, 1, 90.
- Masrul, M. (2019). Gambaran Pola Asuh Psikososial Anak Stunting dan Anak Normal di Wilayah Lokus Stunting Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat Sumatera Barat. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 8(1), 112. <https://doi.org/10.25077/jka.v8i1.978>
- Media, Y., & Elfemi, D. (2021). Permasalahan Sosial Budaya Dan Alternatif Kebijakan Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Pada Balita Di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekologi Kesehatan, Vol 20 No 1 (2021): Jurnal Ekologi Kesehatan*, 56–68. <https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/jek/article/view/4130/2329>
- Mediani, H. S., Nurhidayah, I., & Lukman, M. (2020). Pemberdayaan Kader Kesehatan tentang Pencegahan Stunting pada Balita. *Media Karya Kesehatan*, 3(1), 82–90. <https://doi.org/10.24198/mkk.v3i1.26415>
- Megawati, G., & Wiramihardja, S. (2019). Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dalam Mendeteksi dan Mencegah Stunting. *Dharmakarya: Jurnal Apikasi Iptek Untuk Masyarakat*, 8(3), 154. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v8i3.20726>
- Pasalina, E. putri, Hendri Devita, Sari, N., Vitri Yuli Afni Amran, Suryanis, I., & Novi Maya Sari. (2022). Hubungan Karakteristik Keluarga Dengan Kejadian Stunting Pada Remaja Di Sman 1 Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah PANNMED (Pharmacist, Analyst, Nurse, Nutrition, Midwivery, Environment, Dentist)*, 17(3), 460–464. <https://doi.org/10.36911/panmed.v17i3.1433>
- Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan Stunting dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(1), 225–229. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.253>
- Ramadhan, M. F., Saepudin, H. T., & SE, Ms. (2023). *Analisis Sektor Unggulan Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2019*. Unuversitas Pasundan.
- Vinci, A. S., Bachtiar, A., & Parahita, I. G. (2022). Efektivitas Edukasi Mengenai Pencegahan Stunting Kepada Kader: Systematic Literature Review. *Jurnal Endurance*, 7(1), 66–73. <https://doi.org/10.22216/jen.v7i1.822>
- Weidner, E. W. (1970). Development and innovational roles. *Development Administration in Asia*, 399–421.
- Yasril, A. I., & Sari, M. (2022). Aplikasi Structural Equation Modeling Untuk Mengkaji Faktor Penyebab Stunting Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Endurance*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.22216/jen.v7i1.656>